

IMPLEMENTASI PROGRAM HIDROPONIK 1000 LUBANG TANAM PADA KECAMATAN KARAWACI KOTA TANGERANG

Dila Marisa Faujiah^{1*}, Ayuning Budiati²

^{1,2}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima:

02-05-2026

Disetujui:

04-05-2026

Dipublikasi:

01-06-2026

Kata Kunci:

*Implementasi Program;
Hidroponik 1000 Lubang
Tanam; Kelompok Wanita
Tani*

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada implementasi Program Hidroponik 1000 Lubang Tanam di Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti menurunnya partisipasi anggota aktif Kelompok Wanita Tani (KWT), keterbatasan pendamping program, ketidaklengkapan sarana hidroponik, serta rendahnya kepatuhan dan responsivitas KWT dalam pencatatan dan pelaporan kegiatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program Hidroponik 1000 Lubang Tanam dengan menggunakan teori Marilee S. Grindle melalui metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Hidroponik 1000 Lubang Tanam di Kecamatan Karawaci belum berjalan optimal. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan pendampingan, peningkatan pemasaran hasil, peningkatan partisipasi anggota KWT, serta dukungan kebijakan daerah yang lebih spesifik agar program dapat berjalan secara berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai negara agraris dengan potensi sumber daya alam yang besar, khususnya di sektor pertanian. Sektor ini memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pangan merupakan kebutuhan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Selain itu, dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto (terutama Asta Cita ke-2), swasembada pangan dijadikan pilar utama kedaulatan bangsa melalui percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal guna menjaga ketahanan pangan (Badan Pangan Nasional, 2025).

Namun demikian, saat ini luas lahan pertanian terus mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan, terutama di wilayah perkotaan. Provinsi Banten menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang mengalami penurunan luas lahan pertanian, termasuk di daerah perkotaan yang semakin terbatas dalam memproduksi pangan. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.

Luas Lahan Baku Sawah Provinsi Banten Tahun 2019 dan 2024

Kota/Kabupaten	Lahan Baku Sawah (Ha)	
	2019	2024
Pandeglang	52.640	48.05
Lebak	51.297	52.025
Serang	49.463	52.373
Tangerang	39.389	36.712
Kota Cilegon	1.691	1.151

Kota/Kabupaten	Lahan Baku Sawah (Ha)	
	2019	2024
Kota Serang	8.475	7.535
Kota Tangerang	1.143	183
Tangerang Selatan	238	0
Provinsi Banten	204.335	197.845

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Banten (2026)

Berdasarkan Tabel 1, terjadi penurunan lahan baku pertanian dari tahun 2019 sebesar 204.335 hektar menjadi 197.845 hektar pada tahun 2024, dengan selisih 6.490 hektar. Data tersebut juga menunjukkan bahwa wilayah perkotaan memiliki sisa lahan pertanian yang sangat terbatas, khususnya Kota Tangerang yang hanya memiliki sekitar 183 hektar lahan pertanian.

Kota Tangerang juga merupakan daerah perkotaan dengan jumlah penduduk tertinggi di Provinsi Banten. Tingginya jumlah penduduk tersebut mendorong terjadinya alih fungsi lahan yang cukup besar akibat arus urbanisasi. Selain itu, tingkat kepadatan wilayah mencapai 11.055 km², tertinggi di Provinsi Banten, dengan jumlah penduduk sebesar 1.971,7 ribu jiwa. Tingginya kepadatan penduduk tersebut berdampak pada semakin berkurangnya lahan pertanian (Mukhlis, 2023).

Dalam mengatasi keterbatasan lahan pertanian, Pemerintah Kota Tangerang melakukan upaya penganekaragaman pangan melalui pengembangan pertanian perkotaan (urban farming), sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 11 ayat (1) huruf g. Pertanian perkotaan merupakan kegiatan budidaya dengan memanfaatkan lahan terbatas agar lebih produktif dan bernilai tambah (Austin, 2021).

Pengembangan pertanian perkotaan ini diwujudkan melalui Program Hidroponik 1000 Lubang Tanam yang diinisiasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang sejak tahun 2022. Pelaksanaan program ini diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang Nomor 520/Kep-DKP/2024 tentang petunjuk teknis penyaluran bahan praktik hidroponik. Program ini bertujuan untuk memanfaatkan lahan pekarangan melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) guna meningkatkan produksi sayuran, ketersediaan pangan, serta orientasi pasar. Selain itu, pemanfaatan lahan pekarangan juga dapat memberikan nilai estetika apabila dikelola dengan baik (Sukamto et al., 2022).

Pelaksanaan program menuntut partisipasi aktif masyarakat sebagai sasaran utama (Elvaretta et al., 2023). Kelompok sasaran program ini adalah Kelompok Wanita Tani (KWT), namun hingga saat ini pelaksanaannya belum merata, yaitu baru 32 dari 76 KWT di Kota Tangerang yang telah melaksanakan program tersebut. Kecamatan Karawaci menjadi wilayah dengan jumlah KWT terbanyak yang menjalankan program, yaitu sebanyak 7 KWT. Selain itu, Kecamatan Karawaci juga memiliki jumlah penduduk terbesar kedua, sehingga pelaksanaan program ini menjadi penting dalam mendukung produksi pangan lokal di tengah keterbatasan lahan. Peningkatan jumlah penduduk akan diikuti oleh meningkatnya kebutuhan pangan (Alfiansyah & Marseto, 2023), dan apabila tidak diimbangi dengan produksi yang memadai, dapat menimbulkan kerentanan pangan (Ramdan et al., 2025).

Namun, dalam pelaksanaan Program Hidroponik 1000 Lubang Tanam di Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, peneliti masih menemukan beberapa permasalahan. Pertama, partisipasi aktif anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) mengalami penurunan dan tidak lagi sesuai dengan kriteria dalam pedoman teknis, yaitu minimal 10 anggota aktif. Pada kenyataannya, terdapat beberapa KWT yang jumlah anggota aktifnya tidak lagi memenuhi kriteria tersebut, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.
Keaktifan Anggota Kelompok Wanita Tani (KWT)
Pelaksana Program Hidroponik 1000 Lubang Tanam pada Kecamatan Karawaci

No.	Kelompok Wanita Tani (KWT)	Anggota KWT Aktif (Awal)	Anggota KWT Aktif (Sekarang)	Keterangan Keaktifan KWT
1	Pakcoy (Melati 1)	11	10	Aktif
2	Inspirasi Urang Baraya	15	15	Aktif
3	Melati 2 RT 2	10	7	Aktif
4	Cabai Rawit	13	3	Tidak Aktif
5	Kenanga	15	5	Aktif
6	Anthurium	10	10	Aktif
7	Pelangi	10	7	Aktif
Total		84	57	

Sumber: Olah Data Peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa terjadi penurunan jumlah anggota aktif pada beberapa KWT pelaksana Program Hidroponik 1000 Lubang Tanam. Terdapat 4 KWT yang jumlah anggota aktifnya tidak lagi sesuai dengan kriteria pedoman teknis, yaitu KWT Melati 2 RT 2, Cabai Rawit, Kenanga, dan Pelangi. Di antara KWT tersebut, KWT Cabai Rawit memiliki jumlah anggota aktif paling sedikit dibandingkan KWT lainnya di Kecamatan Karawaci. Minimnya anggota aktif ini berdampak pada keberlangsungan program, bahkan pada saat peneliti melakukan wawancara lapangan tahun 2026, KWT tersebut sudah tidak aktif. Oleh karena itu, partisipasi aktif pelaksana program menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program.

Kedua, lemahnya karakteristik lembaga atau rezim dalam melakukan monitoring dan evaluasi program, yang disebabkan oleh keterbatasan jumlah pendamping wilayah dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang. Jumlah pendamping yang tersedia hanya 6 orang untuk 13 kecamatan, sehingga satu pendamping menangani 2 hingga 3 wilayah kecamatan. Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, yang menyebutkan bahwa satu pendamping idealnya membina maksimal 16 kelompok tani. Dengan demikian, jumlah pendamping yang ada belum memadai.

Ketiga, ketidaklengkapan sumber daya yang dialokasikan kepada KWT dalam pelaksanaan Program Hidroponik 1000 Lubang Tanam, khususnya terkait distribusi sarana seperti atap spandek transparan sebagai pelindung tanaman serta pemenuhan nutrisi. Padahal, sarana tersebut telah ditetapkan dalam pedoman teknis untuk diberikan kepada setiap KWT. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Tim Koordinator KWT Kota Tangerang pada 29 Desember 2025, kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran.

Keempat, rendahnya tingkat kepatuhan dan daya tanggap KWT dalam pencatatan serta pelaporan pelaksanaan program. Dalam petunjuk teknis, pelaksana program diwajibkan melakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala kepada Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang. Hal ini penting untuk memantau perkembangan pelaksanaan program, namun dalam praktiknya belum berjalan optimal.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji implementasi Program Hidroponik 1000 Lubang Tanam di Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Program ini penting dalam pengembangan urban farming di wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk tinggi namun keterbatasan lahan pertanian, sebagai upaya memenuhi kebutuhan pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan oleh Kelompok Wanita Tani (KWT), sekaligus meningkatkan produksi, ketersediaan, aksesibilitas, dan penyediaan pangan yang berorientasi pasar.

TINJAUAN PUSTAKA

Administrasi publik merupakan proses pengelolaan urusan pemerintahan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Salah satu bentuk implementasi administrasi publik adalah pelaksanaan kebijakan publik sebagai upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Menurut Marilee S. Grindle (1980) dalam (Nurdin, 2019), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua aspek utama, yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan kebijakan (context of policy). Pada dimensi isi kebijakan, terdapat beberapa unsur penting yang menentukan keberhasilan implementasi, yaitu pihak yang kepentingannya dipengaruhi (interest affected), manfaat yang diperoleh (type of benefits), serta jangkauan perubahan yang diharapkan (extent of change envisioned). Selain itu, faktor lain yang turut mempengaruhi adalah letak pengambilan keputusan (site of decision making), pelaksana program (program implementor), serta sumber daya yang dialokasikan (resources committed). Unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh tujuan kebijakan, tetapi juga oleh siapa yang terlibat, bagaimana manfaat dirasakan, serta sejauh mana sumber daya tersedia.

Sementara itu, pada dimensi lingkungan kebijakan, Grindle menekankan pentingnya faktor kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat (power, interest, and strategies of actors involved), karakteristik lembaga atau rezim yang berkuasa (institution and regime characteristics), serta tingkat kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (compliance and responsiveness). Interaksi antaraktor, kapasitas kelembagaan, serta tingkat kepatuhan dan responsivitas pelaksana menjadi faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan. Dengan demikian, analisis implementasi kebijakan perlu memperhatikan tidak hanya isi kebijakan, tetapi juga konteks lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengkaji implementasi Program Hidroponik 1000 Lubang Tanam di Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik, serta disajikan dalam bentuk deskripsi pada konteks yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode (Nasution, 2023).

Fokus penelitian ini adalah implementasi Program Hidroponik 1000 Lubang Tanam di Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Penetapan fokus penelitian bertujuan untuk memberikan batasan kajian agar proses observasi dan analisis menjadi lebih terarah (Sirajuddin, 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif dari Miles et al. (2014), yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Sementara itu, keabsahan data diuji melalui triangulasi teknik dan sumber, member check, serta pertimbangan etis (ethical consideration).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di lapangan mengenai implementasi Program Hidroponik 1000 Lubang Tanam di Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, analisis dilakukan dengan menggunakan teori Marilee S. Grindle (1980) dalam (Nurdin, 2019) yang mencakup dua dimensi, yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan kebijakan (context of policy).

Pertama, dimensi isi kebijakan (content of policy) yang terdiri atas beberapa subdimensi sebagai berikut.

Pada aspek pihak yang kepentingannya dipengaruhi (interest affected), Program Hidroponik 1000 Lubang Tanam dilatarbelakangi oleh keterbatasan lahan pertanian di wilayah perkotaan akibat alih fungsi lahan. Program ini diinisiasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang dalam mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan yang sempit dan kurang produktif. Pihak-pihak yang terlibat dalam program ini didominasi oleh unsur pemerintah, seperti Dinas Ketahanan Pangan, kecamatan, dan kelurahan, serta Kelompok Wanita Tani (KWT) sebagai pelaksana di lapangan. Pembiayaan program bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang dalam bentuk penyediaan bahan praktik kepada KWT. Sementara itu, penyaluran bahan praktik hidroponik dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang kepada KWT sebagai pelaksana program. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan dalam pelaksanaan program relatif tidak kompleks, karena lebih terfokus pada sinergi antara pemerintah dan KWT sebagai kelompok sasaran.

Pada aspek manfaat yang diperoleh (type of benefits), program ini memberikan berbagai manfaat, seperti peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam budidaya hidroponik, pemanfaatan lahan pekarangan, kemudahan akses terhadap sayuran segar, serta kontribusi terhadap ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan anggota KWT. Namun, dalam implementasinya masih terdapat kendala, terutama pada aspek pemasaran hasil panen yang belum optimal. Kondisi ini menyebabkan pendapatan yang diperoleh anggota KWT tidak stabil, sehingga berpengaruh terhadap menurunnya partisipasi anggota. Selain itu, keterbatasan jenis dan jumlah produksi, kerusakan sarana, serta gangguan hama juga mempengaruhi optimalisasi manfaat program. Dengan demikian, manfaat program belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Pada aspek jangkauan perubahan yang diharapkan (extent of change envisioned), program ini telah memberikan perubahan positif, seperti meningkatnya akses terhadap sayuran sehat dan pemanfaatan lahan sempit menjadi lebih produktif. Namun, perubahan tersebut belum dirasakan secara menyeluruh, karena jangkauan penerima manfaat masih terbatas dan belum semua KWT melaksanakan program. Selain itu, peningkatan pendapatan anggota juga belum signifikan akibat kendala pemasaran. Selain itu, diketahui bahwa sebagian besar KWT menggunakan lahan dengan status sewa pinjam, sehingga keberlanjutan program menjadi rentan apabila lahan tersebut sewaktu-waktu tidak dapat digunakan lagi. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek keberlanjutan program masih menghadapi tantangan struktural yang cukup signifikan.

Pada aspek letak pengambilan keputusan (site of decision making), pengambilan keputusan dalam Program Hidroponik 1000 Lubang Tanam berada pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang, khususnya pada tingkat pimpinan dinas, dengan mempertimbangkan masukan dari bidang teknis serta pendamping wilayah. Sementara itu, kecamatan dan kelurahan berperan sebagai koordinator dan fasilitator administratif. Dalam praktiknya, koordinasi lebih sering dilakukan secara langsung antara dinas dan KWT. Meskipun demikian, KWT juga memiliki ruang untuk mengambil keputusan dalam menghadapi kendala di lapangan, selama tetap berkoordinasi dengan pihak dinas. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, meskipun tetap bersifat top-down.

Pada aspek pelaksana program (program implementor), pelaksanaan Program Hidroponik 1000 Lubang Tanam melibatkan beberapa aktor, yaitu Dinas Ketahanan Pangan sebagai penanggung jawab utama, kecamatan dan kelurahan sebagai unsur pendukung, serta Kelompok Wanita Tani (KWT) sebagai pelaksana teknis di lapangan. Dinas berperan dalam penetapan kriteria penerima, penyediaan fasilitas, serta pembinaan dan monitoring melalui pendamping wilayah. Sementara itu, KWT menjadi aktor kunci dalam menjalankan program secara langsung. Dukungan sosial dari masyarakat juga turut memperkuat pelaksanaan program. Dengan demikian, implementasi program berjalan secara kolaboratif, meskipun masih didominasi oleh peran pemerintah.

Pada aspek sumber daya yang dialokasikan (*resources committed*), pelaksanaan program ini melibatkan sumber daya manusia, finansial, serta sarana dan prasarana. Namun, ketiga aspek tersebut belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal. Dari sisi sumber daya manusia, jumlah pendamping wilayah masih terbatas, yaitu hanya 6 orang untuk 13 kecamatan, sehingga satu pendamping menangani lebih dari satu wilayah. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya monitoring dan evaluasi di lapangan. Dari sisi finansial, keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam pemenuhan kebutuhan program, termasuk dalam mendukung pemasaran hasil panen. Sementara itu, dari sisi sarana dan prasarana, ditemukan ketidaksesuaian dengan standar teknis, seperti ketidaklengkapan atap pelindung, kendala instalasi, serta kerusakan pada sistem pengairan. Hal tersebut berpotensi menghambat keberlangsungan program.

Kedua, dimensi lingkungan kebijakan (*context of policy*) yang terdiri atas beberapa subdimensi sebagai berikut.

Pada aspek kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat (*power, interest, and strategies of actors involved*), Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang memiliki peran dominan dalam mengarahkan kebijakan serta pelaksanaan program, mulai dari penyusunan pedoman teknis hingga pembinaan dan pendampingan kepada KWT. Strategi yang dilakukan meliputi sosialisasi, pembinaan teknis, pendampingan, penyediaan sarana, serta penguatan koordinasi melalui forum diskusi, termasuk penggunaan media komunikasi seperti WhatsApp. Selain itu, KWT juga berperan dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat serta memanfaatkan media sosial untuk mendukung penyebaran informasi dan pemasaran hasil panen. Forum grup diskusi WhatsApp juga digunakan sebagai media komunikasi antaranggota KWT dan pendamping wilayah dalam mendukung pelaksanaan program. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemanfaatan teknologi komunikasi dalam memperkuat koordinasi antaraktor.

Pada aspek karakteristik lembaga dan rezim (*institution and regime characteristics*), pelaksanaan program menunjukkan dominasi peran pemerintah daerah, khususnya Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang sebagai aktor utama. Dukungan pemerintah daerah diwujudkan melalui penyediaan anggaran dan penyusunan pedoman teknis program. Namun demikian, jumlah pendamping wilayah yang terbatas menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan masih belum optimal. Selain itu, belum adanya kebijakan khusus yang secara spesifik mengatur Program Hidroponik 1000 Lubang Tanam maupun Kelompok Wanita Tani (KWT) menyebabkan pelaksanaan program di lapangan masih bergantung pada pedoman teknis yang ada.

Pada aspek kepatuhan dan daya tanggap (*compliance and responsiveness*), pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal. Dari sisi kepatuhan, masih ditemukan penurunan jumlah anggota aktif KWT yang tidak sesuai dengan kriteria teknis, serta ketidakkonsistenan dalam pencatatan dan pelaporan kegiatan. Sementara itu, dari sisi daya tanggap, KWT dan masyarakat menunjukkan respons yang cukup baik dalam menghadapi kendala di lapangan melalui komunikasi dan koordinasi dengan dinas. Namun, daya tanggap dari pihak dinas, khususnya pendamping wilayah, masih terbatas akibat jumlah pendamping yang tidak memadai. Kondisi ini berdampak pada lambatnya respons terhadap permasalahan yang muncul di lapangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Hidroponik 1000 Lubang Tanam di Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya berbagai kendala pada dimensi isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*context of policy*) berdasarkan analisis teori Marilee S. Grindle.

Pada dimensi isi kebijakan, permasalahan utama terletak pada belum optimalnya manfaat yang diperoleh akibat kendala pemasaran, keterbatasan produksi, serta hambatan teknis dalam pelaksanaan program. Selain itu, jangkauan program masih terbatas dan belum merata pada seluruh KWT, serta keberlanjutan program terancam oleh keterbatasan kepemilikan lahan.

Sumber daya yang dialokasikan juga belum memadai, baik dari sisi pendampingan, anggaran, maupun sarana dan prasarana.

Sementara itu, pada dimensi lingkungan kebijakan, kendala terlihat pada karakteristik kelembagaan yang belum sepenuhnya mendukung, ditandai dengan belum adanya kebijakan khusus yang mengatur program hidroponik secara spesifik serta keterbatasan jumlah pendamping wilayah. Selain itu, tingkat kepatuhan dan daya tanggap pelaksana program juga belum optimal, terlihat dari menurunnya partisipasi anggota KWT serta ketidakkonsistenan dalam pencatatan dan pelaporan kegiatan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui penguatan pendampingan, peningkatan kapasitas dan partisipasi anggota KWT, optimalisasi pemasaran hasil panen, serta dukungan kebijakan yang lebih spesifik dari pemerintah daerah agar program dapat berjalan secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Alfiansyah, A., & Marseto, M. (2023). Analisis faktor harga internasional gandum, penggunaan gandum, PDB, dan jumlah penduduk Indonesia terhadap impor gandum HS (1001) di Indonesia tahun (2000–2022). *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 10(1), 1–15. <https://doi.org/10.23969/oikos.v10i1.16585>
- Austin, T., & Marleni, M. (2021). Implementasi program kampung iklim: Urban farming melalui hidroponik dan budikdamber di Kelurahan Sialang Palembang. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 1(3), 96–104. <https://doi.org/10.53769/jai.v1i3.128>
- Badan Pangan Nasional. (2025). *Diversifikasi dan keamanan pangan jadi kunci menuju swasembada pangan*. <https://badanpangan.go.id/blog/post/diversifikasi-dan-keamanan-pangan-jadi-kunci-menuju-swasembada-pangan>
- Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang. (2024). *Surat keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Nomor 520/Kep.-DKP/2024 tentang petunjuk teknis penyaluran bahan praktek hidroponik 1000 lubang tanam*.
- Elvaretta, I. D., Marom, A., & Nurcahyanto, H. (2024). Implementasi program urban farming di Kelurahan Bambankerep Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. *Journal of Management and Public Policy*, 13(2), 1–17. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i2.43710>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Mukhlis, I., Priambodo, M. P., Suwanan, A. F., Cahayati, N., Saputra, D. R., Camila, E. M., & Kinanthi, K. (2023). Inovasi urban farming dan pemberdayaan perempuan untuk desa tangguh pangan. *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 7(5), 4877–4886. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i5.17364>
- Nasution, A. F. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Harfa Creative.
- Nurdin, E. S. (2019). *Teori-teori analisis implementasi kebijakan publik*. Maulana Media Grafika.
- Ramdan, M., Sujaya, D. H., Athomala, A., Suryana, B. S., Yulianti, E., Pebrianti, F., Ramadhan, P. G. A., Ariyanti, S. R., & Novianti, S. (2025). *Ketahanan pangan berbasis inovasi dan pemberdayaan lokal*. Alinea Edumedia.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39100>
- Sirajuddin, S. (2023). *Mengenal penelitian kualitatif: Panduan bagi peneliti pemula*. AGMA.
- Sukamto, M. H., Ohorella, Z., & Tabara, R. (2022). *Peningkatan produktivitas tanah, tanaman, dan sumber daya petani (suatu pendekatan dengan pemanfaatan pupuk organik menuju sistem pertanian berkelanjutan)*. Deepublish.